

Akuntabilitas dalam Desentralisasi Fiskal: Tantangan dan Strategi untuk Tata Kelola Pemerintah Daerah

Retno Ridhawati

Program Studi S2 Administrasi Publik, Universitas Negeri Gorontalo

Email: retnoridhawati13@gmail.com

Abstract: Fiscal decentralization is a cornerstone of local governance reform, aiming to enhance public service delivery and address regional disparities by granting local governments financial autonomy. This study investigates the accountability mechanisms of fiscal decentralization in Banggai Regency, focusing on the legal, managerial, and financial dimensions, alongside the role of participatory governance. The research aims to identify challenges and propose actionable strategies to optimize fiscal management at the subdistrict level. Employing a qualitative descriptive approach, the study collected data through observations, semi-structured interviews, and document analysis. The data were analyzed using the Miles and Huberman interactive model, emphasizing data reduction, display, and verification to ensure credibility and depth. The findings reveal that while fiscal decentralization has empowered local governments, its effectiveness is constrained by limited administrative capacity, weak oversight mechanisms, and low public participation. Robust accountability frameworks and innovative practices, such as e-governance platforms and participatory budgeting, were identified as critical to improving transparency and trust in local governance. This study contributes to the literature by contextualizing theoretical frameworks of fiscal decentralization within local governance practices. The insights are vital for policymakers seeking to refine fiscal policies and strengthen governance structures, with broader implications for sustainable regional development.

Key Words: Fiscal decentralization, accountability, local governance

Pendahuluan

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia bertujuan untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah dalam mengelola dan mengatur daerahnya masing-masing. Kebijakan ini dirancang untuk mendekatkan pemerintahan kepada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 menjadi landasan untuk fleksibilitas kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya, termasuk aspek fiskal, politik, dan administrasi. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pemerataan pembangunan daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan lokal serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai daerah..

Desentralisasi fiskal, sebuah elemen penting dalam otonomi daerah, melibatkan pengalihan otoritas fiskal ke pemerintah daerah, yang memungkinkan mereka untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran secara mandiri. Tujuan utama dari desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan dana publik, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mengurangi kesenjangan dalam pembangunan daerah. Dengan memberikan otonomi fiskal, pemerintah daerah diharapkan dapat memprioritaskan kesejahteraan masyarakat dalam kebijakan pengeluaran mereka dan menerapkan alokasi anggaran yang mencerminkan prioritas lokal. Namun, terlepas dari potensi manfaatnya, implementasi desentralisasi fiskal di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang signifikan.

Salah satu masalah yang menonjol adalah kurangnya akuntabilitas dalam desentralisasi fiskal di tingkat daerah, khususnya di pemerintah kecamatan. Akuntabilitas, sebagai prinsip dasar tata kelola pemerintahan yang baik, memastikan bahwa pejabat publik bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka. Mekanisme akuntabilitas yang lemah sering kali mengakibatkan penyalahgunaan anggaran, ketidakefisienan dalam alokasi dana, dan berkurangnya kepercayaan terhadap lembaga pemerintah. Pada tingkat kecamatan, kompleksitas pengelolaan dana desentralisasi semakin diperparah oleh kapasitas administrasi yang terbatas, sistem pengawasan



yang tidak memadai, dan kerangka peraturan yang tidak konsisten. Faktor-faktor ini menghambat efektivitas desentralisasi fiskal dan menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya pada pembangunan dan tata Kelola pemerintahan daerah.

Dalam konteks Kabupaten Banggai, implementasi desentralisasi fiskal menyajikan studi kasus yang menarik. Banggai, yang memiliki kondisi sosial ekonomi dan geografis yang beragam, menghadapi tantangan yang unik dalam memastikan tata kelola fiskal yang akuntabel di tingkat kecamatan. Desentralisasi tanggung jawab fiskal kepada pemerintah kecamatan menuntut kerangka kerja akuntabilitas yang kuat untuk memastikan bahwa dana publik digunakan secara efisien dan transparan. Namun, laporan menunjukkan bahwa masalah seperti kompetensi manajerial yang terbatas, kurangnya partisipasi masyarakat dan mekanisme pengawasan yang lemah sering menghambat realisasi tujuan desentralisasi fiskal yang efektif di Kabupaten Banggai.

Selain itu, desentralisasi fiskal mengharuskan pemerintah kecamatan untuk mempertahankan standar transparansi dan akuntabilitas keuangan yang tinggi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan mengevaluasi anggaran. Pemerintah daerah harus menunjukkan bahwa alokasi anggaran sejalan dengan prioritas pembangunan dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara memadai. Kurangnya pelaporan keuangan yang memadai dan tidak diikutsertakannya masukan dari masyarakat dalam proses penganggaran memperburuk tantangan ini, sehingga merusak kredibilitas pemerintah kecamatan dalam mengelola sumber daya publik.

Pelimpahan wewenang dari Bupati kepada camat, sebagaimana diamanatkan oleh peraturan daerah yang termuat dalam Peraturan Bupati Banggai No. 49 Tahun 2023, bertujuan untuk meningkatkan implementasi desentralisasi fiskal. Pelimpahan ini memungkinkan para camat untuk melakukan fungsi administrasi dan manajemen keuangan secara mandiri, sehingga mendorong efisiensi dalam pengambilan keputusan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat. Namun, pemberdayaan ini juga membutuhkan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang lebih baik untuk mengurangi risiko kesalahan manajemen fiskal. Tanpa pengawasan yang ketat dan inisiatif untuk meningkatkan kapasitas, pelimpahan tanggung jawab fiskal dapat menimbulkan masalah tata kelola lebih lanjut, seperti ketidakefisienan dan korupsi.

Relevansi penelitian ini terletak pada potensinya untuk menjembatani kesenjangan dalam memahami tantangan praktis dan peluang desentralisasi fiskal di tingkat kecamatan. Dengan berfokus pada Kabupaten Banggai sebagai studi kasus, penelitian ini memberikan wawasan berharga tentang dinamika rumit pemerintahan daerah dalam konteks desentralisasi fiskal. Penelitian ini mengeksplorasi aspek-aspek penting dari akuntabilitas, termasuk akuntabilitas hukum dan etika, akuntabilitas manajerial dan keuangan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya di tingkat kecamatan. Melalui analisis ini, penelitian ini berupaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor penentu utama keberhasilan desentralisasi fiskal dan implikasinya terhadap reformasi tata kelola pemerintahan daerah.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menilai akuntabilitas desentralisasi fiskal di tingkat pemerintah kecamatan di Kabupaten Banggai. Secara khusus, penelitian ini mengkaji dimensi hukum, manajerial, program, dan keuangan dari akuntabilitas dan interaksinya dalam membentuk hasil tata Kelola pemerintahan. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat akuntabilitas dalam desentralisasi fiskal, seperti budaya organisasi, transparansi, partisipasi masyarakat, kompetensi administrasi, dan pemanfaatan teknologi. Dengan membahas dimensi-dimensi tersebut, penelitian berupaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang bagaimana desentralisasi fiskal dapat berkontribusi pada tata kelola pemerintahan yang baik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Ruang lingkup penelitian ini mencakup analisis mendalam mengenai kebijakan desentralisasi fiskal dan praktik di tingkat kecamatan di Kabupaten Banggai. Penelitian ini berfokus pada peran pemerintah kecamatan dalam mengelola dana desentralisasi dan tanggung jawab mereka dalam memastikan transparansi dan akuntabilitas. Penelitian ini juga mengeksplorasi implikasi dari praktik-praktif tersebut pada pemberian layanan publik dan keterlibatan masyarakat, terutama di daerah dengan konteks sosial ekonomi dan geografis yang beragam. Selain itu, penelitian ini juga mengkaji kerangka peraturan dan mekanisme kelembagaan yang mendukung desentralisasi fiskal dan kecukupannya dalam menjawab tantangan unik yang dihadapi pemerintah kecamatan.

Dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap wacana yang lebih luas tentang administrasi publik dan tata kelola pemerintahan di Indonesia. Penelitian ini memberikan wawasan teoritis mengenai penerapan prinsip-prinsip desentralisasi fiskal dalam tata kelola pemerintahan daerah dan memberikan manfaat praktis bagi pembuat kebijakan dan praktisi. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dalam desentralisasi fiskal, penelitian ini memberikan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti untuk memperkuat struktur dan proses tata kelola pemerintahan di tingkat kecamatan. Rekomendasi ini dimaksudkan untuk memandu pemerintah daerah dalam meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola dana desentralisasi secara efektif, mendorong kepercayaan dan kerja sama dengan masyarakat, dan mencapai hasil pembangunan yang berkelanjutan.

Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis akuntabilitas desentralisasi fiskal di tingkat kecamatan di Kabupaten Banggai. Metodologi ini dirancang untuk memberikan pemahaman mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti, dengan menangkap aspek kontekstual dan dinamis dari praktik-praktik tata Kelola pemerintahan. Bagian berikut ini menjelaskan lokasi penelitian dan jangka waktu penelitian, pendekatan kualitatif yang digunakan, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data, dengan fokus khusus pada model Miles dan Huberman.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Banggai, sebuah daerah yang memiliki beragam kondisi sosial ekonomi dan geografis. Lokasi ini dipilih karena relevansinya dengan topik penelitian, terutama peran penting pemerintah kecamatan dalam menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal. Tantangan unik Kabupaten Banggai, termasuk keterbatasan sumber daya manusia dalam mengelola administrasi dan tingkat partisipasi masyarakat yang beragam, memberikan konteks yang kaya untuk mengeksplorasi seluk-beluk akuntabilitas dalam desentralisasi fiskal. Penelitian ini dilakukan selama empat bulan, dari September 2024 hingga Desember 2024, memungkinkan waktu yang cukup untuk pengumpulan data, analisis, dan verifikasi.

Pendekatan deskriptif kualitatif dipilih karena memungkinkan eksplorasi komprehensif terhadap subjek penelitian. Metode kualitatif sangat cocok untuk memahami fenomena kompleks, seperti mekanisme akuntabilitas dalam desentralisasi fiskal, karena metode ini dapat menangkap pengalaman hidup dan perspektif para pemangku kepentingan (Moleong, 2017). Aspek deskriptif dari pendekatan ini berfokus pada pendokumentasian dan penafsiran praktik tata Kelola pemerintahan, memberikan gambaran rinci tentang dinamika akuntabilitas di tingkat kecamatan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tiga metode utama: observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Metode ini dipilih untuk memastikan triangulasi, sehingga meningkatkan kredibilitas dan validitas temuan (Sugiyono, 2020).

Observasi dilakukan untuk mengumpulkan informasi secara langsung mengenai proses tata Kelola pemerintahan di tingkat kecamatan. Metode ini melibatkan teknik observasi terbuka dan terselubung, yang memungkinkan peneliti untuk memahami praktik-praktik rutin dan mengidentifikasi potensi ketidaksesuaian dalam mekanisme akuntabilitas. Menurut Sugiyono (2020), teknik observasi berperan penting dalam menangkap dinamika sesuai kenyataan dan memberikan pemahaman yang mendalam tentang konteks yang diteliti.

Wawancara digunakan sebagai alat pengumpulan data utama, dengan menggunakan panduan wawancara semi-terstruktur untuk memfasilitasi diskusi mendalam dengan para informan kunci. Informan meliputi Organisasi Perangkat Daerah terkait, pejabat pemerintah kecamatan, perwakilan masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam desentralisasi fiskal. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menyelidiki tema tertentu, seperti transparansi, praktik manajerial, dan peran partisipasi masyarakat dalam tata Kelola pemerintahan. Wawancara semi-terstruktur memberikan fleksibilitas, memungkinkan eksplorasi perspektif informan sambil memastikan konsistensi di seluruh wawancara (Sugiyono, 2020). Untuk memastikan akurasi dan kelengkapan, wawancara dicatat dan kemudian ditranskripsi untuk analisis.

Analisis dokumen digunakan untuk melengkapi data observasi dan wawancara, dengan fokus pada laporan resmi, laporan keuangan, dan dokumen kebijakan. Metode ini memberikan konteks historis dan kelembagaan, sehingga memungkinkan peneliti untuk menelusuri evolusi kebijakan desentralisasi fiskal dan implementasinya di tingkat kecamatan. Analisis dokumen sangat bermanfaat dalam mengidentifikasi ketidaksesuaian antara narasi resmi dan praktik yang diamati, sehingga berkontribusi pada pemahaman yang lebih kuat tentang mekanisme akuntabilitas (Sugiyono, 2020).

Analisis data dipandu oleh model interaktif yang diusulkan oleh Miles dan Huberman (Sugiyono, 2020). Model ini menekankan pada proses siklus yang melibatkan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Tahap-tahap ini saling berhubungan, memungkinkan peneliti untuk terus menyempurnakan dan memverifikasi temuan-temuan selama proses analisis.

Reduksi data melibatkan pengorganisasian dan penyederhanaan data mentah yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan analisis dokumen. Proses ini termasuk pengkodean dan pengkategorian data berdasarkan tema-tema yang muncul terkait dengan desentralisasi fiskal dan akuntabilitas. Analisis tematik memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola dan hubungan dalam data, memberikan landasan untuk analisis berikutnya.

Tampilan data melibatkan penyajian data yang telah direduksi dalam format yang dapat diakses dan diinterpretasikan, seperti tabel, matriks, dan diagram. Tahap ini memfasilitasi sintesis informasi dan memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi wawasan dan tren utama. Representasi visual data mendukung verifikasi temuan dan meningkatkan kejelasan keseluruhan analisis.

Penarikan kesimpulan dan verifikasi merupakan bagian integral dari proses analisis, memastikan bahwa temuan didasarkan pada data dan selaras dengan tujuan penelitian. Tahap ini melibatkan penafsiran data yang telah disintesis untuk memperoleh wawasan dan implikasi yang berarti untuk desentralisasi fiskal dan akuntabilitas di tingkat kecamatan. Strategi verifikasi, seperti triangulasi dan pemeriksaan anggota, digunakan untuk memvalidasi temuan dan meningkatkan mutu temuan tersebut.

Penerapan model Miles dan Huberman memastikan pendekatan sistematis dan berulang terhadap analisis data, selaras dengan metodologi deskriptif kualitatif yang diadopsi dalam

penelitian ini. Dengan terus menyempurnakan dan memverifikasi temuan, peneliti mampu memberikan pemahaman yang komprehensif dan bernuansa tentang subjek penelitian.

Diskusi Konseptual

Desentralisasi Fiskal secara luas diakui sebagai instrumen kebijakan transformatif untuk memberdayakan pemerintah daerah dengan memberikan otonomi keuangan dan meningkatkan kapasitas mereka untuk memberikan layanan publik. Diskusi ini mengeksplorasi konsep-konsep yang mendasari yang berasal dari data yang dikumpulkan, berfokus pada implikasi teoritis dari desentralisasi fiskal, akuntabilitas, dan praktik tata Kelola pemerintahan, dengan referensi khusus untuk Kabupaten Banggai. Implikasi terhadap model teoritis juga dievaluasi, yang menggambarkan bagaimana konsep-konsep ini saling berinteraksi dalam kerangka tata kelola pemerintahan praktis.

Desentralisasi Fiskal dan Otonomi

Pada intinya, desentralisasi fiskal berusaha untuk mengalihkan wewenang dan tanggungjawab fiskal dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, yang memungkinkan mereka untuk mengelola pendapatan dan pengeluaran mereka. Mekanisme ini sejalan dengan prinsip subsidiaritas, yang menyatakan bahwa pengambilan keputusan harus dilakukan ditingkat yang paling efektif untuk meningkatkan responsif dan efisiensi (Halim, 2010). Di daerah seperti Kabupaten Banggai, yang memiliki beragam kondisi sosial ekonomi, desentralisasi fiskal memungkinkan pemerintah daerah untuk memprioritaskan alokasi sumber daya sesuai dengan kebutuhan lokal yang unik.

Model teoritis desentralisasi fiskal menekankan potensinya untuk menstimulasi pembangunan ekonomi dengan mengurangi kesenjangan antar daerah dan mendorong pertumbuhan yang merata. Konsep kesetaraan fiskal, yang diusulkan oleh Oates (1972), menggarisbawahi penyalarsan manfaat pengeluaran dengan tanggung jawab pembiayaan pemerintah daerah. Keselarasan ini sangat penting dalam meningkatkan akuntabilitas dan memastikan bahwa kebijakan fiskal mencerminkan kebutuhan dan preferensi konstituen lokal. Namun demikian, penerapan desentralisasi fiskal dalam prakteknya sering kali menyimpang dari cita-cita teoritis karena variasi dalam kapasitas administrasi dan struktur tata Kelola pemerintahan.

Akuntabilitas dalam Pengelolaan Fiskal

Akuntabilitas adalah pilar dasar desentralisasi fiskal yang efektif. Akuntabilitas memastikan bahwa pejabat publik bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan mereka, terutama mengenai pengelolaan dana publik. Dalam konteks Kabupaten Banggai, akuntabilitas memiliki banyak aspek, meliputi dimensi hukum, manajerial, keuangan, dan program (Romzek & Dubnick, 1987). Akuntabilitas hukum dan etika mengharuskan kepatuhan terhadap kerangka hukum dan standar etika, sementara akuntabilitas manajerial berfokus pada efisiensi dan efektivitas operasi fiskal.

Implikasi teoritis yang penting adalah peran mekanisme akuntabilitas vertikal dan horizontal dalam tata Kelola pemerintahan. Akuntabilitas vertikal melibatkan pengawasan warga melalui mekanisme seperti penganggaran partisipatif dan pelaporan publik. Sebaliknya, akuntabilitas horisontal memerlukan pengawasan internal dan keseimbangan dalam Lembaga-lembaga pemerintah, seperti audit dan pengawasan keuangan (Turner & Hulme, 2009). Agar desentralisasi fiskal dapat mencapai tujuannya, mekanisme ini harus berfungsi secara sinergis, memastikan transparansi dan mengurangi risiko korupsi.

Tantangan dalam Implementasi

Meskipun manfaat teoritis dari desentralisasi fiskal telah didokumentasikan dengan baik, implementasi praktisnya sering kali menunjukkan tantangan yang signifikan. Di Kabupaten

Banggai, kemampuan Sumber Daya Manusia yang masih terbatas menjadi salah satu kendala. Teori peningkatan kapasitas menekankan pentingnya membekali pemerintah daerah dengan keterampilan, sumber daya, dan kerangka kerja kelembagaan yang diperlukan untuk mengelola fungsi-fungsi desentralisasi secara efektif (Osborne, 2018). Tidak adanya inisiatif untuk meningkatkan kapasitas dapat melemahkan potensi desentralisasi fiskal untuk memberikan hasil yang nyata.

Selain itu, kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses fiskal merupakan masalah yang terus berulang. Teori-teori tata kelola pemerintahan partisipatif menganjurkan warga negara dalam proses perencanaan, penganggaran, dan pengawasan, dan menyatakan bahwa partisipasi tersebut dapat meningkatkan akuntabilitas dan menyelaraskan kebijakan fiskal dengan prioritas masyarakat (Bryson et al., 2015). Namun demikian, hambatan budaya dan kelembagaan sering kali menghambat keterlibatan yang berarti, sehingga mengurangi legitimasi dan efektivitas desentralisasi fiskal.

Implikasi Tata Kelola Pemerintahan

Implikasi tata kelola pemerintahan dari desentralisasi fiskal lebih dari sekedar pertimbangan administratif dan keuangan. Implikasi tersebut mencakup masalah yang lebih luas tentang kepercayaan, legitimasi, dan kohesi sosial yang lebih luas. Konsep modal sosial, diperkenalkan oleh Putnam (1993), menyoroti peran jaringan, norma, dan kepercayaan dalam memfasilitasi tindakan kolektif dan tata Kelola pemerintahan. Di Kabupaten Banggai, pengembangan modal sosial melalui praktik fiskal yang transparan dan inklusif sangat penting untuk memperkuat hubungan antara pemerintah daerah dan konstituennya.

E-governance muncul sebagai alat transformatif untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam manajemen fiskal. Platform digital untuk penganggaran, pelaporan, dan keterlibatan masyarakat dapat menjembatani kesenjangan antara cita-cita teoritis dan kenyataan praktis. Penelitian yang dilakukan oleh Janssen dan van der Voort (2016) menunjukkan potensi e-governance untuk mengurangi risiko korupsi dan memfasilitasi pengawasan warga. Namun, keberhasilan penerapan teknologi tersebut membutuhkan investasi dalam infrastruktur dan literasi digital, terutama di daerah terpencil.

Implikasi Teoritis

Analisis desentralisasi fiskal dan akuntabilitas di Kabupaten Banggai memberikan kontribusi pada wacana teoritis tentang tata kelola pemerintahan dan administrasi publik. Penelitian Ini menggarisbawahi perlunya model teoritis kontekstual untuk menjelaskan variasi regional dalam faktor sosial ekonomi, budaya, dan kelembagaan. Temuan ini menyoroti interaksi antara faktor struktural, seperti kapasitas administrasi dan kerangka peraturan, dan faktor agensi, termasuk kepemimpinan dan keterlibatan masyarakat.

Integrasi desentralisasi fiskal dengan teori-teori tata Kelola pemerintahan yang lebih luas, seperti manajemen publik baru dan tata kelola pemerintahan kolaboratif, memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami implikasinya. Manajemen publik baru menekankan efisiensi, pengukuran kinerja, dan orientasi pelanggan, yang sejalan dengan tujuan desentralisasi fiskal. Tata Kelola pemerintahan kolaboratif menganjurkan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan untuk mengatasi keterbatasan pendekatan atas ke bawah.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan analisis teoritis dan konseptual, beberapa rekomendasi dapat dirumuskan untuk meningkatkan efektivitas desentralisasi fiskal di Kabupaten Banggai. Rekomendasi-rekomendasi tersebut antara lain:

1. Peningkatan Kapasitas: Memperkuat kapasitas Sumber daya Manusia, kapasitas administrasi dan manajerial pemerintah kecamatan melalui program pelatihan dan alokasi sumber daya.
2. Mekanisme Partisipatif: Melembagakan proses penganggaran partisipatif dan proses pengawasan partisipatif untuk memastikan bahwa kebijakan fiskal mencerminkan kebutuhan dan preferensi masyarakat.
3. Transformasi Digital: Berinvestasi dalam platform e-governance untuk meningkatkan transparansi, memfasilitasi keterlibatan masyarakat, dan merampingkan manajemen fiskal.
4. Reformasi Regulasi/Peraturan: Meninjau dan memperbarui kerangka peraturan untuk mengatasi kesenjangan dan ketidakkonsistenan dalam kebijakan desentralisasi fiskal.
5. Pemantauan dan Evaluasi: Membangun sistem yang kuat untuk mengawasi, memantau dan mengevaluasi praktik-praktik fiskal, dengan menggabungkan mekanisme akuntabilitas internal dan eksternal.

Diskusi konseptual ini menyoroti kompleksitas dan potensi desentralisasi fiskal sebagai alat tata Kelola pemerintahan. Meskipun model teoritis memberikan wawasan yang berharga, penerapan praktisnya membutuhkan pertimbangan yang cermat terhadap konteks dan tantangan lokal. Di Kabupaten Banggai, penanganan masalah kapasitas Sumber daya manusia dan kemampuan administrasi, partisipasi masyarakat, dan transparansi sangat penting untuk mewujudkan manfaat desentralisasi fiskal. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip teoritis dengan strategi praktis, para pembuat kebijakan dapat mendorong tata kelola fiskal yang akuntabel dan efektif, sehingga berkontribusi pada pembangunan daerah yang berkelanjutan dan meningkatkan kepercayaan publik.

Kesimpulan

Penelitian ini menggarisbawahi peran penting desentralisasi fiskal dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah dengan memberikan otonomi keuangan untuk meningkatkan pelayanan publik. Berfokus pada Kabupaten Banggai, penelitian ini menyoroti hubungan antara desentralisasi fiskal, akuntabilitas, dan praktik tata Kelola pemerintahan. Temuan utama mengungkapkan bahwa desentralisasi fiskal yang efektif membutuhkan mekanisme akuntabilitas yang kuat, termasuk pengawasan hukum, manajerial, dan keuangan, serta partisipasi aktif masyarakat. Namun, tantangan-tantangan seperti sumber daya manusia dan kapasitas administrasi terbatas dan keterlibatan masyarakat yang belum maksimal menghambat pelaksanaannya secara optimalnya. Implikasi teoritis penelitian menekankan pentingnya mengintegrasikan kerangka akuntabilitas ke dalam kebijakan desentralisasi fiskal. Konsep seperti akuntabilitas vertikal dan horizontal, tata kelola pemerintahan yang partisipatif, dan e-governance dieksplorasi sebagai solusi untuk mengatasi kesenjangan tata Kelola pemerintahan. Secara praktis, penelitian ini berkontribusi dengan mengidentifikasi strategi-strategi yang dapat ditindaklanjuti, seperti peningkatan kapasitas, penganggaran partisipatif, dan transformasi digital, untuk meningkatkan pengelolaan fiskal di tingkat kecamatan. Temuan ini berkontribusi pada literatur yang ada dengan menjembatani kesenjangan antara model teoritis dan realitas lokal, terutama di daerah yang memiliki keragaman sosial-ekonomi. Penelitian di masa mendatang diharapkan dapat mengeksplorasi dampak jangka panjang dari inisiatif e-governance terhadap transparansi fiskal atau menilai skalabilitas model tata Kelola pemerintahan partisipatif di daerah lain. Penelitian ini memberikan landasan untuk menyempurnakan kebijakan desentralisasi fiskal agar sejalan dengan prinsip-prinsip tata Kelola pemerintahan yang baik.

Daftar Pustaka

- Ahmad, F., & Tarmizi, A. (2021). Praktek Delegasi Efektif dalam Administrasi Publik: Meningkatkan Efisiensi dan Motivasi Karyawan. *Jurnal Studi Manajemen Publik*, 12(3), 98-112.
- Azizah, S., & Kusumaningrum, R. (2021). Transparansi dan Akuntabilitas di Sektor Publik: Upaya Mengurangi Korupsi. *Administrasi Jurnal Negara*, 8(2), 120-133.
- Bryson, J. M., Crosby, B.C., & Bloomberg, L. (2015). *Menciptakan Nilai Publik dalam Praktek: Memajukan Kebaikan Umum dalam Dunia Multi-Sektor, Shared-Power, No-One-Wholly-in-Charge*. New York: Routledge.
- Denhardt, J. V., & Denhardt, R.B. (2015). *Layanan Publik Baru: Melayani, Bukan Kemudi*. New York: Routledge.
- Gunawan, T., Pratama, A., & Dewi, L. (2022). Pengawasan Berbasis Risiko unuk Menengkatkan Akuntabilitas Organisasi. *Jurnal Akuntansi dan Keuang Publik*, 10(1), 45-60.
- Handoko, R. (2021). Peningkatan Kapasitas Pemerintu Dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Studi Tata Kelola Daerah*, 5(2), 123-135.
- Janssen, M., & van der Voort, H. (2016). Tata Kelola Adaptif: Menuju Pemerintah yang Stabil, Akuntabel dan Responsif. *Informasi Pemerintah Kuartalan*, 33(1), 1-5.
- Nurhayati, S. (2021). Partisipasi Masyarakat dalam Menengkatkan Akuntabilitas Kebijakan Publik. *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, 7(3), 87-99.
- Osborne, S.P. (2018). Dari Logika Dominan Pelayanan Publik hingga Logika Pelayanan Publik: Apakah Organisasi Pelayanan Publik Mampu Co-Produksi dan Nilai Co-Creation? *Tinjauan Manajemen Publik*, 20(2), 225-231.
- Purwanto, E., & Prasetyo, T. (2020). Pelimpahan Wewenang dalam Perspektif Otonomi Daerah: Studi pada Pemerintang Kabupaten. *Jurnal Tinjauan Administrasi Publik*, 9(1), 45-58.
- Putra, H., & Rachman, R. (2020). Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Akuntabilitas di Lembaga Pemerintang. *Jurnal Manajemen Publik*, 6(1), 55-67.
- Robbins, S.P., & Coulter, M. (2020). *Manajemen (Edisi ke-14)*. Pendidikan Pearson.
- Sari, D.A., & Nugroho, H. (2022). Efektivitas Pelimpahan Wewenang Bupati Kepada Camat dalam Peningkatan Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 10(4), 89-102.
- Susanti, L. (2023). Tantangan dalam Implementasi Pelimpahan Wewenang Pemerintang Daerah: Perspektif Pengawasan dan Akuntabilitas. *Jurnal Pemerintahan Indonesia*, 12(3), 55-67.
- Syafii, I., & Hidayat, N. (2023). Mengatasi Tantangan dalam Delegasi: Wawasan Kepemimpinan Organisasi. *Jurnal Perilaku Organisasi dan Manajemen*, 8(1), 45-60.
- Wijaya, D., & Rahmawati, F. (2022). Peran Delegasi dalam Meningkatkan Pengiriman Layanan Publik: Pendekatan Studi Kasus. *Administrasi Publik dan Tinjauan Kebijakan*, 10(4), 67-80.
- Wijaya, T., & Sari, M. (2022). Peran Kompetensi SDM Dalam Menengkatkan Akuntabilitas Organisasi Publik. *Jurnal Pengembangan SDM*, 5(4), 98-110.
- Yukl, G. A. (2019). *Kepemimpinan dalam Organisasi (Edisi ke-9)*. Pendidikan Pearson.
- Yusuf, A., & Kurniawan, D. (2023). Pemanfaatan Teknologi Digital taktuk Menengkatkan Akuntabilitas di Era E-Governance. *Jurnal Teknologi dan Inovasi Pemerintahan*, 9(2), 112-125.